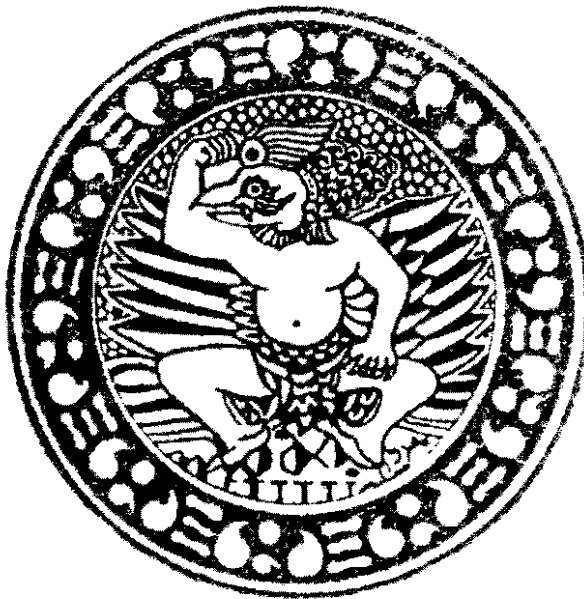


HEGEMONI NEGARA TERHADAP ORGANISASI PEREMPUAN

(Studi Hegemoni Negara Terhadap Pembentukan Persepsi
Aktivis Organisasi Perempuan di Surabaya)

SKRIPSI

KK
Fis P 04/01
Am6
lu



Oleh :

SRI AMBARWATI

079514746

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Semester Gasal 2000/2001

HEGEMONI NEGARA TERHADAP ORGANISASI PEREMPUAN

**(Studi Hegemoni Negara Terhadap Pembentukan Persepsi
Aktivis Organisasi Perempuan di Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh :

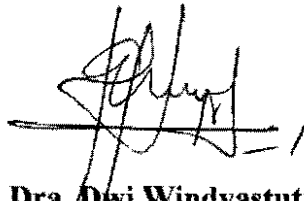
SRI AMBARWATI
079514746

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Semester Gasal 2000/2001

Setuju untuk diujikan
Surabaya, 7 Desember 2000

Dosen Pembimbing



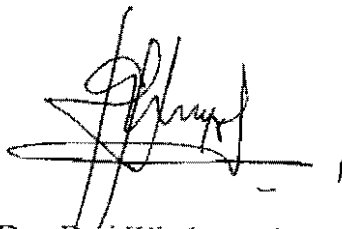
Dra. Dwi Windyastuti
Nip. 131 801 643

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 7 Desember 2000

Panitia Penguji terdiri dari :

Ketua :

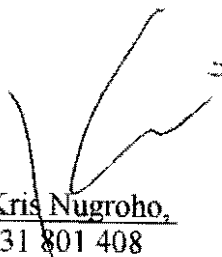


Dra. Dwi Windyastuti
Nip. 131 801 643

Anggota :



Drs. Haryadi, Msi
Nip. 131 655 466



Drs. Kris Nugroho,
Nip. 131 801 408

Abstrak

Perempuan, sampai kapanpun akan tetap menjadi perbincangan yang menarik dan tetap aktual. Baik itu permasalahan yang menyangkut pribadi perempuan maupun yang berkaitan dengan sekitarnya. Berangkat dari asumsi demikian, penelitian ini mencoba mengupas permasalahan perempuan berkaitan dengan negara, tempat dimana perempuan dapat berperan serta di dalam proses bernegaranya. Dengan adanya fenomena minimnya peran perempuan di sektor publik terutama politik, permasalahan ini mulai diangkat. Perkembangan peran perempuan yang cukup berarti, terutama dalam hal berorganisasi, di masa setelah kemerdekaan yang dilanjutkan pada masa Orde Lama ternyata harus mengalami *backlash* (kemunduran) di masa Orde Baru. Yakni sejak difusikannya organisasi menjadi satu arah dengan pemerintah, dengan dibentuknya Dharma Wanita, Dharma Pertiwi serta gerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Orde baru mengkonstruksikan organisasi perempuan tersebut sebagai organisasi yang patuh dan setia pada pemerintah, sebagai salah satu upaya negara menghegemoni masyarakat sipil. Meskipun pada waktu Orba mencapai krisis kekuasaan, muncul organisasi yang “berseberangan” dengan pemerintah.

Dengan bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk persepsi aktivis organisasi perempuan, akibat hegemoni negara, yang mengambil lokasi di Surabaya, serta bagaimana negara menghegemoni organisasi perempuan, penelitian ini menjelaskannya dengan metode kualitatif. Untuk penggambarannya sendiri diperoleh dari data yang dihimpun dari hasil wawancara serta melalui pengisian daftar pertanyaan kepada sejumlah informan dan responden.

Dari proses tersebut kemudian diperoleh penggambaran bahwa Orba berhasil membentuk persepsi aktivis organisasi perempuan bentukan pemerintah “menyetujui” apa yang telah dikonstruksikan negara selama hampir 32 tahun. Ini merupakan keberhasilan negara melakukan hegemoni, sehingga secara tidak sadar mereka menerima konstruksi tersebut. Bahwa peran perempuan adalah sebagaimana yang sudah menjadi kodratnya. Artinya gender yang sebenarnya merupakan peran perempuan dan laki-laki yang dapat dipertukarkan diasumsikan sebagai kodrat yang permanen. Perempuan saat itu dianggap ada jika dia adalah seorang ibu dan isteri. Sebagai perempuan berarti dia harus lembut dan cantik yang hanya cocok dengan pekerjaan yang lembut, teliti dan sabar. Hal ini dikonstruksikan dengan sesuatu yang berbau politik, yang politik itu sendiri dikaitkan dengan sesuatu yang kotor dan penuh intrik. Kesan bahwa politik itu menakutkan yang disosialisasikan oleh Orba, berakibat pada pembentukan persepsi yang salah kaprah. Baik itu terhadap organisasi tempat mereka mengaktualisasikan diri maupun tentang gender dan juga terhadap negara yang menjadi subyek dalam melakukan hegemoni.

Perbedaan persepsi yang terbentuk antara aktivis organisasi pemerintah dan organisasi yang otonom/independen semakin memperlihatkan bahwa negara berhasil menghegemoni banyak aktivis perempuan yang rata-rata menjadi aktivis di organisasi bentukan pemerintah.